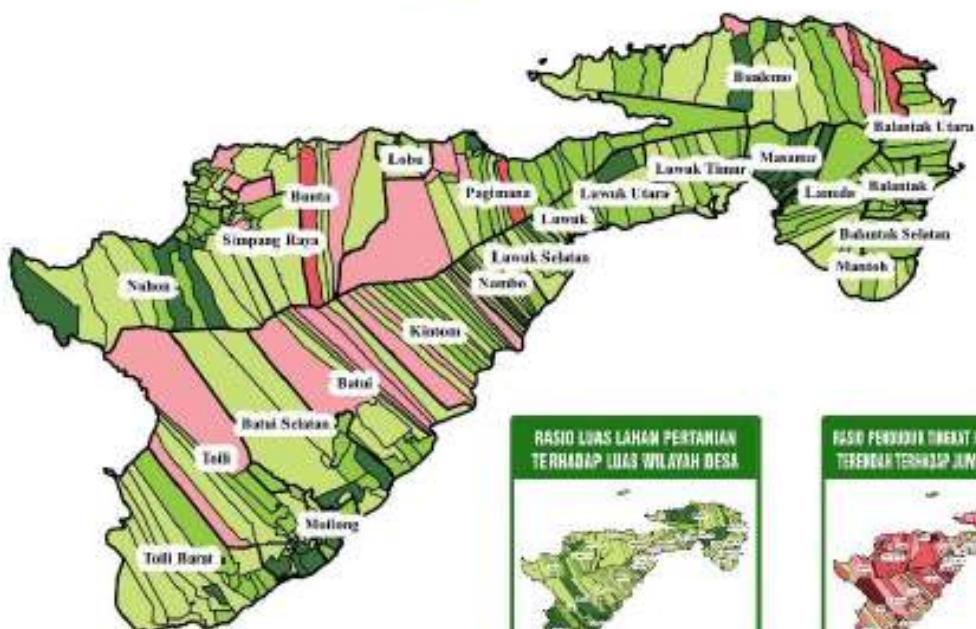


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)



RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP LUAS WILAYAH DESA



RASIO PENGETAHUAN TENTANG KONSEP INTERVENSI TERHADAP TERHADAP JUMLAH PENGETAHUK



RASIO TERAGA KESAKTIAN TERHADAP KEPADATAN PENGETAHUK



RASIO SARANA DAN PRASARANA PENDAYA PANGAN TERHADAP JEMBATAN RUMAH TANGGA



AKSES PENGHUBUNG DESA



RASIO JENJAL RUMAH TANGGA TERHADAP AKSES AIR Bersih TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA





BUPATI BANGGAI

S A M B U T A N

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya BUKU PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai yang telah berupaya menyusun buku ini saya mengucapkan terima kasih. Kepada semua instansi pemerintah dan swasta di daerah ini agar Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan, penyusunan program dan intervensi kegiatan oleh para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun daerah. Semoga akselerasi program ketahanan pangan lebih cepat, fokus dan tepat sasaran agar target pemerintah untuk pemerataan pertumbuhan pembangunan melalui penurunan stunting, kemiskinan dan kerentanan pangan dapat segera terwujud.

Terima kasih

Luwuk, September 2024

BUPATI BANGGAI

H. AMIRUDIN

KATA PENGANTAR

Ketahanan Pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi merupakan prasyarat untuk mewujudkan sumberrdaya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam menyusun program, kebijakan serta pelaksanaan intervensi di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan konprehensif, disusunlah peta ketahanan pangan yang merupakan peta tematik menggambarkan situasi pangan dan visualisasi dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan yang mencerminkan tiga aspek pangan.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas- FSVA) Kabupaten Banggai tahun 2024, yang memuat hasil analisa terhadap indikator ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Banggai sampai pada tingkat desa.

Dengan selesainya penyusunan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan penetapan program intervensi dan lokasi wilayah dalam upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Banggai.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI**

Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM, MH
Nip. 19690402 198811 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertaanian (bauk sawah dan ladang yang ditanami padi) terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan, dari 337 desa yang ada di Kabupaten Banggai maka didapatkan Prioritas 2 sejumlah 4 desa (1,19%), prioritas 3 sejumlah 26 desa (7,72%), prioritas 4 sejumlah 95 desa (28,19%), prioritas 5 sejumlah 177 desa (52,52%),

dan prioritas 6 sejumlah 35 desa (10,39%). Desa prioritas 2 terdapat di Kecamatan Bunta Desa Matabas, Kecamatan Pagimana Desa Sepa, Kecamatan Bualemo Desa Binsil K, Desa Taima, Desa prioritas 3 tersebar di Kecamatan Toili Desa Piondo, Desa Ue Mea, Kecamatan Toili Barat Desa Bone Bae, Kecamatan Moilong Desa Mulyoharjo, Desa Karya Jaya, Desa Tou, Kecamatan Batui Desa Ondo-Ondolu, Desa Balantang, Desa Lamo, Desa Honbola, Kecamatan Bunta Desa Hion, Desa Pongian, Desa Lontio, Kecamatan Simpang Raya Desa Simpang Dua, Desa Dowiwi, Desa Koninis, Kecamatan Kintom Desa Babang Buyangge, Desa Tangkiang, Desa Mendono, Kecamatan Pagimana Desa Baloa Doda, Desa Pakowa, Desa Nain, Desa Jaya Bakti, Desa Dongkalan, Kecamatan Bualemo Desa Longkoga Barat, Desa Malik.

7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan Terbatasnya rasio luas baku lahan pertanian (sawah dan ladang padi), terbatasnya sarana penyedia pangan, tingginya rasio penduduk tidak sejahtera, rasio jumlah rumah tangga tanpa air bersih, rasio jumlah tenaga kesehatan, adanya akses jalan yang tidak dapat dilalui sepanjang waktu.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dalam menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penyediaan pangan di daerah non sentra produksi, dan mengoptimalkan sumber daya lokal.
 - b. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, puskesmas), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - e. Peningkatan akses infrastruktur jalan sebagai media penghubung antara desa dan kota atau sebaliknya
 - f. Penyediaan tenaga kesehatan

DAFTAR ISI**Halaman**

SAMBUTAN BUPATI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	3
1.3. Metodologi	6

II. KETERSEDIAAN PANGAN

2.1. Lahan Pertanian.....	11
2.2. Produksi Pangan.....	13
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	20
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	21

III. AKSES TERHADAP PANGAN

3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	22
3.2. Akses Transportasi	23
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	25

IV. PEMANFAATAN PANGAN

4.1. Akses Terhadap Air Bersih	26
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	26
4.3. Dampak (Outcome) dari Status Kesehatan	27
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	30

V. KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	34
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan.....	37

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN38

DAFTAR TABEL

1	Indikator FSVA Kabupaten 2024	7
2	Bobot Indikator Individu	9
3	Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Lahan Pertanian	12
4	Produksi Serealia Pokok dan Umbi umbian 2019-2023 (Ton)	13
5	Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023)	14
6	Produksi Padi 2019-2023 (Ton)	15
7	Produksi Jagung 2019 – 2023 (Ton)	16
8	Produksi Ubi Kayu 2019 – 2023 (Ton)	17
9	Produksi Ubi Jalar 2019 – 2023 (Ton)	19
10	Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Sarana prasarana Ekonomi	20
11	Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kab. Banggai	22
12	Sebaran Desa Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Terendah	23
13	Sebaran Akses Infrastruktur Transportasi Jalan	25
14	Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	26
15	Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan	27
16	Penderita Gizi Buruk 2019 - 2023	28
17	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2023	29
18	Sebaran Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Berdasarkan Prioritas	35
19	Perbandingan Hasil Analisis Kerentanan Pangan Tahun 2023 dan 2024 (P 1-3)	36

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
2	Grafik Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Lahan Pertanian	13
3	Grafik Produksi Serealia Pokok dan Umbi umbian 2019-2023	14
4	Grafik Produksi Total Serealia per Tahun	15
5	Grafik Produksi Padi 2019-2023 (Ton)	16
6	Grafik Produksi Jagung 2019-2023 (Ton)	17
7	Grafik Produksi Ubi Kayu 2019-2023 (Ton)	18
8	Grafik Produksi Ubi Jalar 2019-2023 (Ton)	19
9	Grafik Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Sarana Prasarana Ekonomi	20
10	Grafik Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Terendah	23
11	Grafik Penderita Gizi Buruk 2019-2023	28
12	Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2023	30
13	Grafik Sebaran Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	35
14	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Banggai terdiri dari 23 kecamatan, 337 desa dan 46 Kelurahan dengan total penduduk sebesar 376.808 jiwa (BPS, 2023). Kabupaten Banggai secara geografis terletak di bagian timur Sulawesi. Secara astromonis, Kabupaten Banggai terletak di antara $0^{\circ} 30' - 2^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dan $122^{\circ} 23' - 124^{\circ} 20'$ Bujur Timur. Kabupaten Banggai di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una - Una dan Kabupaten Morowali yang memiliki wilayah daratan seluas $9.672,70 \text{ km}^2$ atau 9.672.700 Ha dan memiliki garis pantai sepanjang 6.315 km. Kabupaten Banggai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 84 meter diatas permukaan laut. Secara klimatologis, Kabupaten Banggai berbeda dengan daerah lain pada umumnya, selama tahun 2022-2023 mengalami musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan Juni sekitar 402 mm^3 , sedangkan pada bulan September sekitar 185 mm^3 dan rendah pada bulan November 100 mm^3 .

Perekonomian Kabupaten Banggai masih tergantung pada sektor Pertanian yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 22,3% menjadi 24,00%. Peningkatan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Pertanian, mengalami peningkatan peranan. Selain sektor pertanian terdapat juga; sektor perdagangan besar dan eceran dari 4,90% menjadi 5,00% ; Sementara sektor lainnya mengalami penurunan yaitu sektor konstruksi dari 8,42% menjadi 8,04%, sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan peranan sebelumnya sebesar 21,40% menjadi 20%; sektor Industri Pengolahan dari sebelumnya 26,33% menjadi sebesar 26%, sektor sosial sebesar 3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Banggai (Sumber : Banggai Dalam Angka, 2020).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan

Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan, kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat Nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009 sampai dengan 2020 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten Banggai telah disusun sejak tahun 2016 dan dimutakhirkan pada tahun 2021. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa yang bersifat dinamis, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten Banggai kembali pada tahun 2024 saat ini.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa. Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi

ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

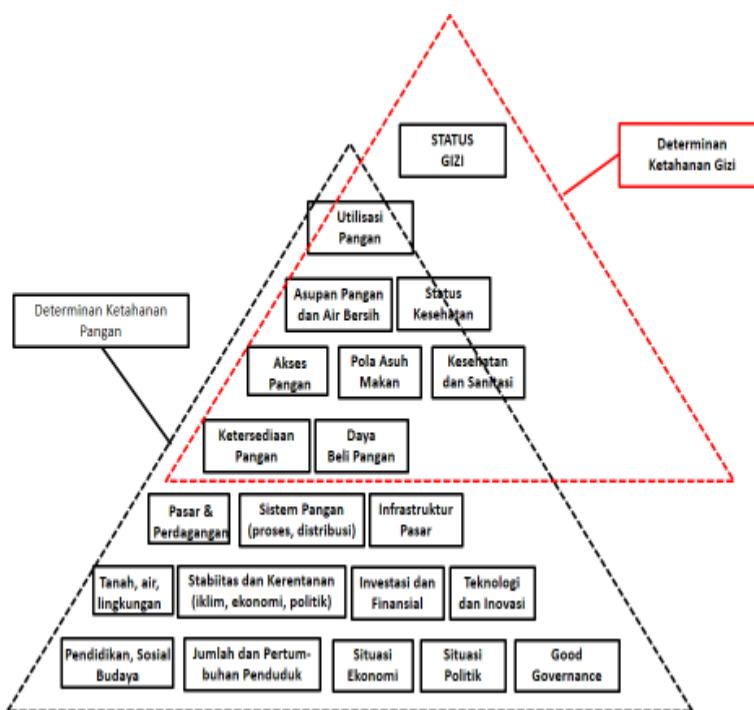
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya sangat penting bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut

konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk

menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya. Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

¹ Disampaikan pada Commitee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi sendiri (dalam negeri/daerah), cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau lebih kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, dalam mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidak mampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidak mampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar

ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1. Indikator FSVA Kabupaten 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap luas wilayah desa	Luas lahan pertanian dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementerian 2023, Dinas TPHP 2023;
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2023, BPS Jumlah Rumah Tangga 2023
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2023 Jumlah Rumah Tangga dari proyeksi SP 2010, BPS 2023
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2023, BPS Jumlah Penduduk 2023 proyeksi SP 2010 Dinas PUPR 2023
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Dinas PUPR Kab. Banggai Tahun 2023, BPS Jumlah Rumah Tangga 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	<p>Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas:</p> <p>1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker)</p> <p>dibandingkan jumlah penduduk desa</p>	Dinas Kesehatan Kab. Banggai Tahun 2023, BPS Jumlah Rumah Tangga 2023

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke- j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke- j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah

Tabel 2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i c_{ij} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke- J

a_i : Bobot indikator ke- i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-*I* kelompok ke-*j*

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok

diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan luas wilayah desa. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk yang digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan adalah luas lahan pertanian yang ditanami komoditi tanaman pangan sebagai pangan pokok setempat dan luas baku lahan sawah karena lahan pertanian tersebut memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 337 desa dan 46 kelurahan di Kabupaten Banggai, Prioritas 3 (2,96%) tersebar di beberapa Kecamatan, berturut-turut dapat disebutkan ; Kecamatan Luwuk sebanyak 4 desa/kelurahan, Kecamatan Luwuk Utara sebanyak 2 desa/kelurahan, Kecamatan Luwuk Selatan 3 desa/kelurahan, dan Kecamatan Pagimana 1 desa/kelurahan. Prioritas 4 (62,90%) tersebar di beberapa kecamatan, berturut-turut dapat disebutkan ; Kecamatan Toili sebanyak 6 desa, Kecamatan Toili Barat 3 desa, Kecamatan Moilong 5 desa, Kecamatan Batui 9 desa,

Kecamatan Batui Selatan 2 desa, Kecamatan Bunta 20 desa, Kecamatan Nuhon 11 desa, Kecamatan Simpang Raya 4 desa, Kecamatan Kintom 14 desa, Kecamatan Luwuk 6 desa/kelurahan, Kecamatan Luwuk Timur 9 desa, Kecamatan Luwuk Utara 8 desa, Kecamatan Luwuk Selatan 7 desa/kelurahan, Kecamatan Nambo 11 desa, Kecamatan Pagimana 30 desa, Kecamatan Bualemo 11 desa, Kecamatan Lobu 10 desa, Kecamatan Lamala 6 desa, Kecamatan Masama 1 desa, Kecamatan Mantoh 8 desa, Kecamatan Balantak 13 desa, Kecamatan Balantak Selatan 11 desa, dan Kecamatan Balantak Utara 10 desa. Prioritas 5 (16,32%) tersebar di beberapa kecamatan, berturut-turut dapat disebutkan ; Kecamatan Toili 10 desa, Kecamatan Toili Barat 3 desa, Kecamatan Moilong 6 desa, Kecamatan Batui 3 desa, Kecamatan Batui Selatan 4 desa, Kecamatan Bunta 2 desa, Kecamatan Nuhon 7 desa, Kecamatan Simpang Raya 5 desa, Kecamatan Luwuk Timur 2 desa, Kecamatan Luwuk Utara 1 desa, Kecamatan Pagimana 1 desa, Kecamatan Bualemo 3 desa, Kecamatan Lamala 4 desa, Kecamatan Masama 3 desa, dan Kecamatan Mantoh 1 desa. Prioritas 6 (16,91%) tersebar di beberapa kecamatan, berturut-turut dapat disebutkan ; Kecamatan Toili 9 desa, Kecamatan Toili Barat 12 desa, Kecamatan Moilong 5 desa, Kecamatan Batui 1 desa, Kecamatan Batui Selatan 4 desa, Kecamatan Nuhon 2 desa, Kecamatan Simpang Raya 3 desa, Kecamatan Luwuk Timur 2 desa, Kecamatan Bualemo 6 desa, Kecamatan Lamala 2 desa, Kecamatan Masama 10 desa dan Kecamatan Mantoh 1 desa. Berikut sebaran jumlah desa terhadap luas lahan pertanian dapat di lihat pada grafik berikut ini;

Tabel 3.Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio lahan pertanian

Prioritas	Jumlah Desa/Kelurahan	Percentase
3	10	2,96
4	212	62,90
5	55	16,32
6	57	16,91

**DESA BERDASARKAN RASIO LUAS
LAHAN
PERTANIAN TERHADAP LUAS
WILAYAH DESA**



Gambar 2. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Lahan Pertanian

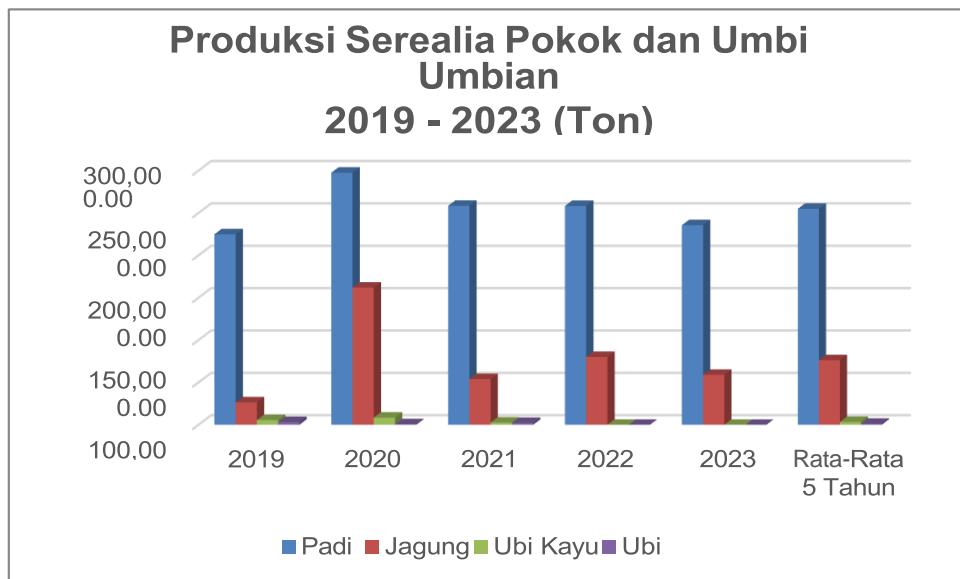
2.2. PRODUKSI PANGAN

Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 24 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai pada tahun 2020 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Banggai yang menyumbang hampir 95.61% dari total produk serealia kabupaten. Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 3, produksi umbi-umbian di Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi meningkat selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 224,802.20 ton tahun 2019 menjadi 235,581.69 ton pada tahun 2023.(Banggai Dalam Angka, BPS, 2023, Dinas TPHP).

Tabel 4. Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Serealia	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 Tahun
Padi	224,802.20	297,525.74	258,411.73	258,287,28	235,581.69	254.921,73
Jagung	26,431.70	161,920.07	53,936.78	80.004,10	58,976.49	76.253,83
Ubi Kayu	5,634.80	8,460.70	2,655.00	-	-	3.350,10
Ubi Jalar	3,153.97	715.25	2,175.50	-	-	1.208,94

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS, Dinas TPHP;



Gambar 3.Grafik Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian (2019-2023)

Tahun 2023, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 294.558,18 ton. Produksi Padi sebanyak 235.581,69 ton, Jagung sebanyak 58.976,49 ton, ubi kayu sebanyak 0 ton, dan ubi jalar sebanyak 0 ton.

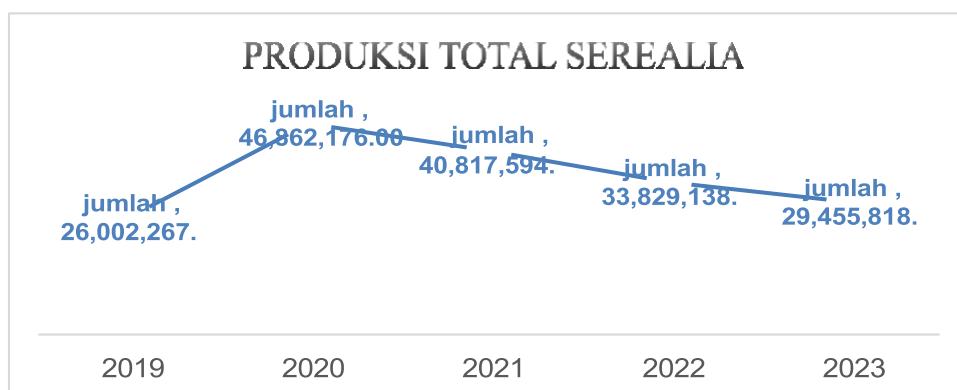
Total produksi serealia dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023. Sebaran total produksi serealia selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 468.621,76 ton dan terkecil pada tahun 2019. Produksi serealia pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023)

Kecamatan	Produksi Total Serealia					Laju Pertumbuhan (2019-2023)
	2019	2020	2021	2022	2023	
1 Toili	52.441,30	57.617,40	67.011,60	70.236,60	70.074,88	63.476,36
2 Toili Barat	47.244,61	55.499,00	59.658,90	69.340,90	63.816,10	59.111,90
3 Moilong	21.258,30	33.303,70	2.776,50	29.415,50	29.081,00	23.167,00
4 Batui	12.728,00	21.925,00	18.201,50	16.400,00	14.948,00	16.840,50
5 Batui Selatan	29.892,92	40.494,00	35.004,76	38.382,48	38.571,81	36.469,19
6 Bunta	4.272,95	20.232,77	7.602,00	6.651,75	8.752,50	9.502,39
7 Nuhon	14.824,34	40.448,07	16.164,10	27.781,80	12.961,00	22.435,86
8 Simpang Raya	12.277,52	18.872,86	17.101,00	13.051,20	10.216,70	14.303,86
9 Kintom	315,00	789,84	87,00	174,00	374,50	348,07
10 Luwuk	146,50	2.842,86	490,00	843,50	691,20	1.002,81
11 Luwuk Timur	5.296,55	14.299,50	12.691,00	9.818,00	5.435,50	9.508,11
12 Luwuk Utara	740,50	1.917,10	60.919,28	398,00	386,75	12.872,33
13 Luwuk Selatan	514,60	3.556,00	715,00	456,75	383,25	1.125,12

14	Nambo	125.70	809.94	133.30	114.25	100.63	256,76
15	Pagimana	2.900.15	12.194.84	2.811.00	1.248.00	1.364.40	4.103,68
16	Bualembo	11.301.91	53.417.68	7.250.25	18.339.50	8.386.00	19.739,07
17	Lobu	1.875.80	4.901.70	342.00	541.00	411.75	1.614,45
18	Lamala	8.322.74	11.676.60	5.886.00	4.422.65	3.302.61	6.722,12
19	Masama	24.276.24	37.150.90	27.062.80	22.161.00	16.737.00	25.477,59
20	Mantoh	1.499.45	11.342.00	1.356.80	1.615.00	2.856.00	3.733,85
21	Balantak	2.140.63	7.945.43	60.025.15	267.00	71.10	14.089,86
22	Balantak Selatan	4.293.85	12.996.27	4.084.50	6.175.00	5.377.50	6.585,42
23	Balantak Utara	1.333.11	4.388.30	801.50	457.50	258.00	1.447,68
Jumlah		260.022,67	468.621,76	408.175,94	338.291,38	294.558,18	353.933,98

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS, Dinas TPHP;



Gambar 4.Grafik Produksi Total Serealia per Tahun

Padi

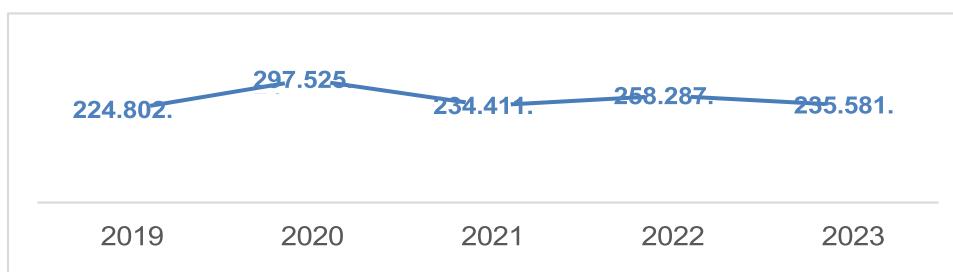
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Banggai selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 6. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2020 di sembilan belas kecamatan. Peningkatan terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai. Produksi padi tertinggi di kecamatan Toili Barat sebesar 69.336,40 ton pada tahun 2022.

Tabel 6. Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton)

N o	Kecamatan	Padi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Toili	51,064.20	50,622.00	64,181.10	68.586,00	67.309,00
2	Toili Barat	47,224.78	55,495.00	59,647.90	69.336,40	63.785,50
3	Moilong	21,023.10	33,024.00	2,663.00	29.057,50	27.709,00
4	Batui	12,160.50	16,681.50	15,236.00	11.720,00	10.548,00
5	Batui Selatan	28,628.72	30,272.40	24,308.96	26.096,58	23.509,51
6	Bunta	969.15	2,265.00	1,579.50	615,00	1.957,50

7	Nuhon	7,577.14	15,984.00	11,228.60	11.512,80	4.492,00
8	Simpang Raya	10,231.02	371.00	9,448.40	4.399,20	7.242,20
9	Kintom	-	35.00	-	27,00	-
10	Luwuk	-	-	-	-	-
11	Luwuk Timur	4,974.75	10,712.00	7,954.20	4.986,80	2.415,00
12	Luwuk Utara	24.70	323.00		6,00	-
13	Luwuk Selatan	-	405.00			-
14	Nambo	28.90	244.14		12,75	-
15	Pagimana	1,262.25	3,452.70	1,698.00	345,00	1.134,00
16	Bualemo	7,464.15	21,100.00	4,358.38	4.308,00	4.298,00
17	Lobu	199.80	3,001.60		129,00	86,25
18	Lamala	5,721.24	8,040.00	4,460.30	3.715,25	2.661,23
19	Masama	24,133.95	34,593.10	27,058.90	21.901,00	16.492,00
20	Mantoh	925.90	3,720.00	588.00	390,00	1.176,00
21	Balantak	481.95	2,480.00		135,00	-
22	Balantak Selatan	352.00	2,613.30		918,00	652,50
23	Balantak Utara	354.00	2,091.00		90,00	114,00
Jumlah		224.802,20	297,525.74	234.411,24	258.287,28	235.581,69

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS, Dinas TPHP



Gambar 5.Grafik Produksi Padi 2019-2023 (Ton)

Jagung

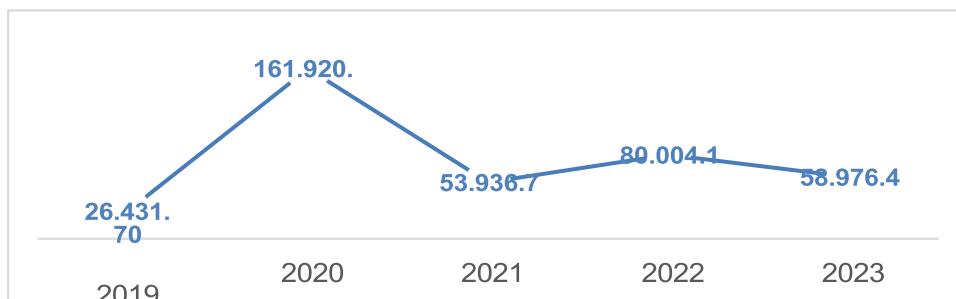
Pada tahun 2021, produksi jagung mencapai 53.936.78 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020. Sebaran produksi jagung tertinggi di Kecamatan Nuhon sebesar 16.269.00 ton, menyusul Kecamatan Batui Selatan sebesar 15.062.30 ton dan terendah Kecamatan Toili Barat sebesar 4.00 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton)

N o	Kecamatan	Jagung				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Toili	742.10	6,787.20	2,393.00	1.650,60	2.765,88
2	Toili Barat	19.83	4.00	11.00	4,50	30,60
3	Moilong	235.20	270.00	43.50	358,00	1.372,00
4	Batui	460.00	5,243.50	2.965.50	4.680,00	4.400,00
5	Batui Selatan	1,222.20	10,170.60	10,675.80	12.285,90	15.062,30

6	Bunta	2,037.00	17,758.87	5,792.50	6.036,75	6.795,00
7	Nuhon	5,362.50	18,731.57	3,860.50	16.269,00	8.469,00
8	Simpang Raya	1,232.00	18,252.91	6,879.60	8.652,00	2.974,50
9	Kintom	292.50	754.84	87.00	147,00	374,50
10	Luwuk	82.00	2,442.86	455.00	843,50	691,20
11	Luwuk Timur	66.40	3,587.50	4,546.80	4.831,20	3.020,50
12	Luwuk Utara	147.00	1,296.00	483.88	392,00	386,75
13	Luwuk Selatan	331.50	3,151.00	652.50	456,75	383,25
14	Nambo	46.80	403.20	83.30	101,50	100,63
15	Pagimana	1,584.60	8,678.74	1,113.00	903,00	230,40
16	Bualemo	3,729.96	32,168.78	7,070.25	14.031,50	4.088,00
17	Lobu	1,107.00	1,655.50	182.00	412,00	325,50
18	Lamala	1,964.60	3,636.60	965.70	707,40	641,38
19	Masama	61.89	2,494.80	3.90	260,00	245,00
20	Mantoh	519.68	7,590.50	768.80	1.225,00	1.680,00
21	Balantak	967.98	5,061.63	332.25	132,00	71,10
22	Balantak Selatan	3,804.75	10,132.57	4,014.50	5.257,00	4.725,00
23	Balantak Utara	414.21	1,646.90	556.50	367,50	144,00
Jumlah		26,431,70	161,920.07	53,936.78	80.004,10	58.976,49

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS, Dinas TPHP



Gambar 6.Grafik Produksi Jagung 2019-2023 (Ton)

Ubi Kayu

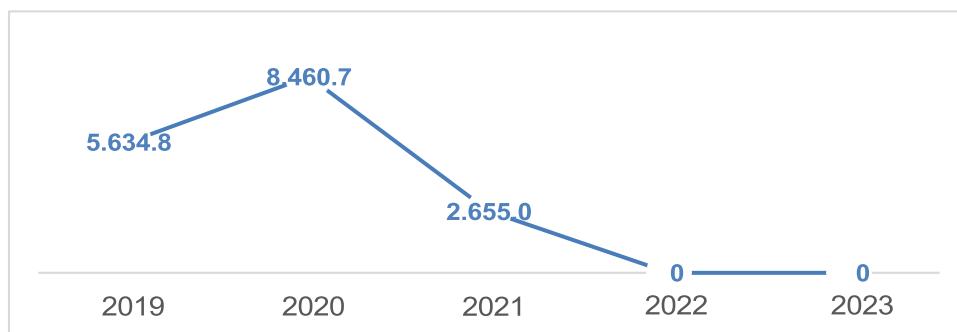
Produksi ubi kayu Menurun dari 5.634.80 ton pada tahun 2019 menjadi 2,655.50 ton pada tahun 2021. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2020 meliputi kecamatan Nuhon sebesar 5.541.40 ton. Rincian produksi ubi kayu tahun 2019 - 2023 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Produksi Ubi Kayu 2019 – 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Ubi Kayu				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Toili	336.00	189.00	437.50	-	-
2	Toili Barat	-	-	-	-	-
3	Moilong	-	-	10.00	-	-

4	Batui	107.50	-	-	-	-
5	Batui Selatan	42.00	51.00	20.00	-	-
6	Bunta	742.00	136.00		-	-
7	Nuhon	1,277.20	5,541.40	615.00	-	-
8	Simpang Raya	21.50	81.30	5.00	-	-
9	Kintom	22.50	-		-	-
10	Luwuk	64.50	326.40	30.00	-	-
11	LuwukTimur	217.00	-	110.00	-	-
12	Luwuk Utara	516.00	298.10	502.50	-	-
13	Luwuk Selatan	104.50	-	20.00	-	-
14	Nambo	-	135.00	40.00	-	-
15	Pagimana	40.50	54.00		-	-
16	Bualemo	82.00	134.50	60.00	-	-
17	Lobu	400.00	215.20	90.00	-	-
18	Lamala	599.10	-	460.00	-	-
19	Masama	80.40	53.80		-	-
20	Mantoh	41.10	26.80		-	-
21	Balantak	453.20	351.00	30.00	-	-
22	Balantak Selatan	61.50	216.80		-	-
23	Balantak Utara	426.30	650.40	225.00	-	-
Jumlah		5,634.80	8,460.70	2.655.00	-	-

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS, Dinas TPHP

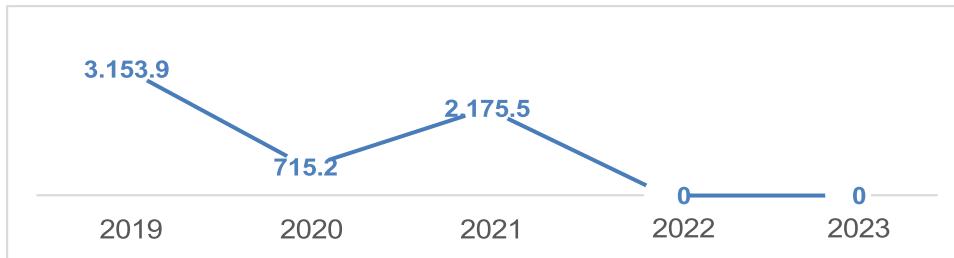


Gambar 7.Grafik Produksi Ubi Kayu 2019-2023 (Ton)

Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3.153,97 ton. Pada tahun 2019 Kecamatan Simpang Raya

merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 793.00 ton, Kecamatan Nuhon sebesar 607.50 ton, Kecamatan Bunta sebesar 524.80 ton dan Kecamatan Toili sebesar 299.00 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Grafik Produksi Ubi Jalar 2019-2023 (Ton)

Tabel 9. Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton)

No	Kecamatan	Ubi Jalar				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Toili	299.00	19.20	-	-	-
2	Toili Barat	-	-	-	-	-
3	Moilong	-	9.70	60.00	-	-
4	Batui	-	-	-	-	-
5	Batui Selatan	-	-	-	-	-
6	Bunta	524.80	72.90	230.00	-	-
7	Nuhon	607.50	191.10	460.00	-	-
8	Simpang Raya	793.00	167.65	768.00	-	-
9	Kintom	-	-	-	-	-
10	Luwuk	-	73.60	5.00	-	-
11	Luwuk Timur	38.40	-	80.00	-	-
12	Luwuk Utara	52.80	-	285.00	-	-
13	Luwuk Selatan	78.60	-	42.50	-	-
14	Nambo	50.00	27.60	10.00	-	-
15	Pagimana	12.80	9.40	-	-	-
16	Bualemo	25.80	14.40	60.00	-	-
17	Lobu	169.00	29.40	70.00	-	-
18	Lamala	37.80	-	-	-	-
19	Masama	-	9.20	-	-	-
20	Mantoh	12.77	4.70	-	-	-
21	Balantak	237.50	52.80	15.00	-	-
22	Balantak Selatan	75.60	33.60	70.00	-	-
23	Balantak Utara	138.60	-	20.00	-	-
Jumlah		3,153.97	715.25	2.175.50	-	-

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2019-2023, BPS, Dinas TPHP

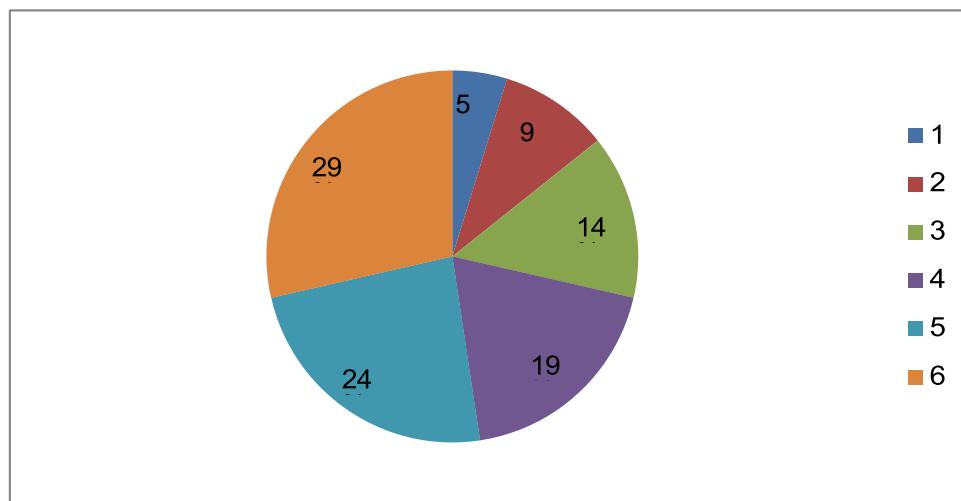
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, mini market, toko, kios, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 337 desa/kelurahan di Kabupaten Banggai 169 desa masuk dalam kategori rentan/kurang sarana penyedia pangan yaitu 41 desa masuk dalam prioritas 1 (12,17 %), 56 desa prioritas 2 (16,62 %) dan 72 desa prioritas 3 (21,36 %).

Tabel 10. Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio sarana prasarana ekonomi

Prioritas	Jumlah Desa/Kelurahan	Persentase
1	41	12.17
2	56	16.62
3	72	21.36
4	81	24.03
5	52	15.43
6	32	9.49



Gambar 9. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rasio Sarana Prasarana

2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai dari tahun 2020-2021 mencapai 1,10% sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 39,75% dan 72,38%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Banggai adalah sebesar 1 – 2 ha. Rasio lahan Pertanian dibandingkan jumlah penduduk adalah sebesar 5,37%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga pada prioritas 1-3 mencapai 169 desa atau 50%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Kebijakan kabupaten Banggai mengenai ketersediaan pangan pada periode 2021-2026 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah/lahan pertanian tanaman pokok; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Peningkatan produktivitas

- a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
- b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
- c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
- d. Pengelolaan air
- e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

(i) Perluasan lahan sawah/lahan pertanian

- a. Pengembangan lahan sawah
- b. Optimalisasi penggunaan/pemanfaatan lahan
- c. Pengembangan dan rehabilitasi Infrastruktur air/Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

(ii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko

- a. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
- b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

(iii) Penguatan kelembagaan bagi petani

- a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
- b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- c. Pemasaran produk pertanian, missal TTI, dll.

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Banggai. Rasio kemiskinan makin berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Banggai mengalami kenaikan dari 7,20 % (29.29 jiwa) tahun 2019, menjadi 7,33 % (28.55 jiwa) tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 banyak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 6,94%.

Tabel 11. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai

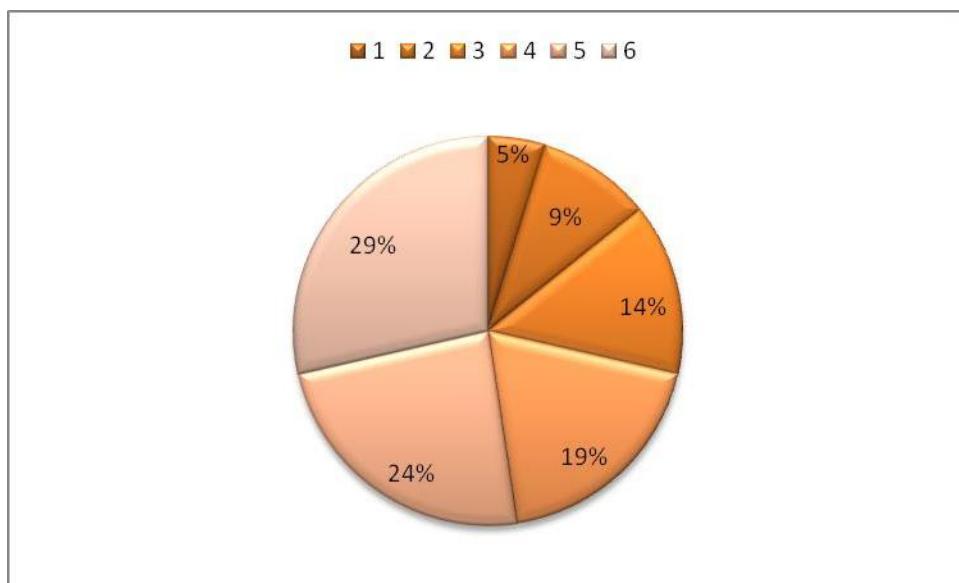
Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	7,20	7,39	7,83	7,33	6,94

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, 2019-2023, BPS

Pada tingkat desa berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2023, terdapat 275 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sebanyak 14 desa (4,15%) Prioritas 1, Sebanyak 120 desa (35,61%) masuk prioritas 2, dan 141 desa (41,83%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 275 desa tersebut.

Tabel 12. Sebaran desa berdasarkan tingkat kesejahteraan terendah

Prioritas	Jumlah Desa/Kelurahan	Percentase
1	14	4.15
2	120	35.61
3	141	41.83
4	51	15.13
5	10	2.96
6	3	0.89

**Gambar 10. Sebaran Jumlah desa berdasarkan tingkat kesejahteraan terendah**

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur dapat menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencar dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk dan jauh kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai, dengan kata lain kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencar.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas

sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada modal kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2023 BPS, di Kabupaten Banggai, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 dan roda 2 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan lebat, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Toili (Desa Sindang Baru), Kecamatan Batui (Desa ondo ondolu) dan Kecamatan Batui Selatan (Desa masungkang), Kecamatan Pagimana (Desa ampera dan dongkalan), Kecamatan Bualemo (Desa Salipi) (Kecamatan Lobu (Desa Dolom, dan Lambuli), Kecamatan Masama (Desa Duata Karya), Kecamatan Mantoh (Desa Garuga). Desa yang tidak dapat dilalui kendaraan Roda 4 tetapi bisa dilalui kendaraan roda 2 terdapat di Kecamatan Lobu (Desa Bahingin). Desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 sepanjang tahun terdapat di Kecamatan Pagimana (desa Baloa doda, Bajo Poat, Balai Gondi, Tampe gomuo dan Sepe).

Jalan merupakan alat transportasi utama di Kabupaten Banggai akan tetapi terdapat beberapa desa di mana alat transportasi laut masih menjadi bagian penting dari transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan alat transportasi laut. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai alat transportasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Pagimana Desa Tampe, gomuo, Balai gondi dan Bajo Poat.

Tabel 13. Sebaran akses Infrastruktur transportasi Jalan

PRIORITAS INDIVIDU	NILAI KATEGORIK	JUMLAH DESA	PERSENTASE
Prioritas 1	4	1	0.29
Prioritas 2	3	-	-
Prioritas 3	2	1	0.29
Prioritas 4	1	335	99.40

3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1- 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 14. Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih

Prioritas	Jumlah Desa	Percentase
1	36	10.68
2	67	19.88
3	65	19.28

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter

umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 15 Sebaran jumlah desa berdasarkan rasio tenaga kesehatan

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	86	25.51
2	67	19.88
3	66	19.58

4.3. DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

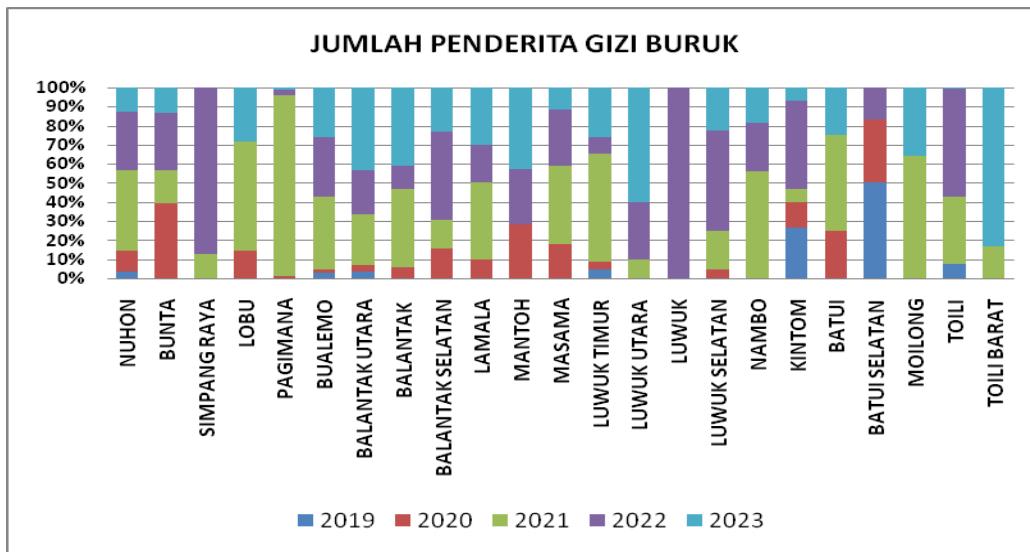
Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Banggai pada tahun 2019-2023 sebanyak 1.002 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi pada tahun 2023 ditemukan di Kecamatan Toili Barat (30 balita), Kecamatan Bualemo (27 balita), Kecamatan Luwuk Selatan (21 balita) dan Kecamatan Moilong (14 balita), dan terendah ditemukan di

Kecamatan Simpang Raya (0 balita), Kecamatan Batui Selatan (0 balita) dan Kecamatan Luwuk (0 balita).

Tabel 16. Penderita Gizi Buruk 2019-2023

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	NUHON	2	6	23	17	7
2	BUNTA	0	9	4	7	3
3	SIMPANG RAYA	0	0	1	7	0
4	LOBU	0	1	4	0	2
5	PAGIMANA	0	3	297	9	3
6	BUALEMO	3	2	39	32	27
7	BALANTAK UTARA	1	1	8	7	13
8	BALANTAK	0	1	7	2	7
9	BALANTAK SELATAN	0	2	2	6	3
10	LAMALA	0	1	4	2	3
11	MANTOH	0	2	0	2	3
12	MASAMA	0	6	14	10	4
13	LUWUK TIMUR	1	1	13	2	6
14	LUWUK UTARA	0	0	2	6	12
15	LUWUK	0	0	0	1	0
16	LUWUK SELATAN	0	4	19	48	21
17	NAMBO	0	0	9	4	3
18	KINTOM	4	2	1	7	1
19	BATUI	0	1	2	0	1
20	BATUI SELATAN	3	2	0	1	0
21	MOILONG	0	0	25	0	14
22	TOILI	10	0	46	74	1
23	TOILI BARAT	0	0	6	0	30
Total		24	44	526	244	164

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai,2023



Gambar 11. Grafik Penderita Gizi Buruk

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 adalah 0 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Banggai 4 jiwa. Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Pagimana (2 jiwa), Balantak (1 jiwa), dan Kintom (1 jiwa) dan terendah (0 jiwa) terdapat di Kecamatan Nuhon, Bunta, Simpang Raya, Lobu, Bualemo, Balantak Utara, Balantak Selatan, Lamala, Mantoh, Masama, Luwuk, Luwuk Timur, Luwuk Selatan, Nambo, Batui, Batui Selatan, Moilong, Toili dan Toili Barat. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan, 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	NUHON	0	0	0
2	BUNTA	0	0	0
3	SIMPANG RAYA	0	0	0
4	LOBU	0	0	0
5	PAGIMANA	0	2	2
6	BUALEMO	0	0	0
7	BALANTAK UTARA	0	0	0
8	BALANTAK	0	1	1
9	BALANTAK SELATAN	0	0	0
10	LAMALA	0	0	0
11	MANTOH	0	0	0
12	MASAMA	0	0	0
13	LUWUK TIMUR	0	0	0
14	LUWUK UTARA	0	0	0
15	LUWUK	0	0	0
16	LUWUK SELATAN	0	0	0
17	NAMBO	0	0	0
18	KINTOM	0	1	1
19	BATUI	0	0	0
20	BATUI SELATAN	0	0	0
21	MOILONG	0	0	0
22	TOILI	0	0	0
23	TOILI BARAT	0	0	0
Total		0	4	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai, 2023



Gambar 12. Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap menjadi perhatian utama di Kabupaten Banggai, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pad anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, serta untuk menghasilkan Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi

masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil zat besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI ekslusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil zat besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi. Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa

dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

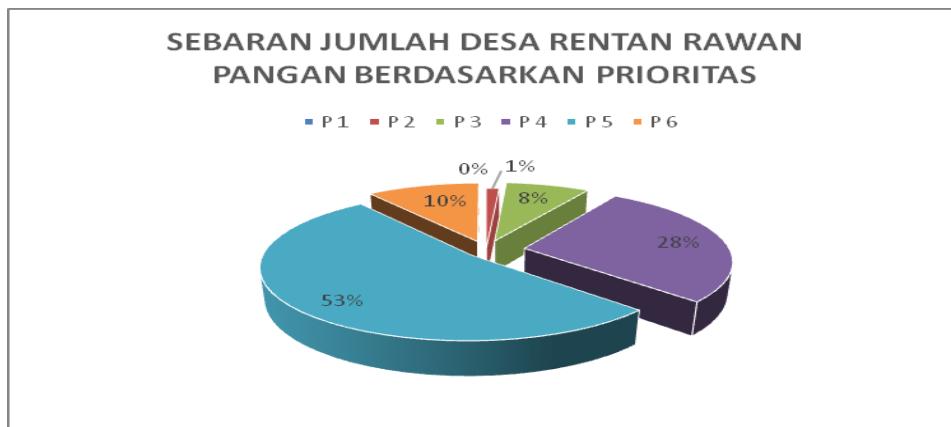
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Lampiran 1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, berdasarkan desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, diikuti prioritas 2 tingkat kerentanan sedang dan prioritas 3 dengan tingkat kerentanan rendah, sedangkan prioritas 4, 5, 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis, dari 337 desa yang ada di Kabupaten Banggai maka didapatkan Prioritas 2 sejumlah 4 desa (1.19%), prioritas 3 sejumlah 26 desa (7.72%), prioritas 4 sejumlah 95 desa (28.19%), prioritas 5 sejumlah 177 desa (52.52%), dan prioritas 6 sejumlah 35 desa (10.39%). Berikut sebaran jumlah desa di Kabupaten Banggai berdasarkan prioritas (2 – 6) ;



Gambar 13. Sebaran Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Berdasarkan Prioritas

Berikut jumlah desa yang termasuk dalam kategori rentan rawan pangan (prioritas 1-3) dapat dilihat pada tabel 5.1 :

Tabel 18. Sebaran Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan berdasarkan Prioritas

PRIORITAS	KECAMATAN	DESA	PERSENTASE
2	BUNTA	MATABAS	1.19
2	PAGIMANA	SEPA	
2	BUALEMO	BINSIL K	
2	BUALEMO	TAIMA	
3	TOILI	PIONDO	7.72
3	TOILI	UE MEA	
3	TOILI BARAT	BONE BAE	
3	MOILONG	MULYOHARJO	
3	MOILONG	KARYA JAYA	
3	MOILONG	TOU	
3	BATUI	ONDO-ONDOLU	
3	BATUI	BALANTANG	
3	BATUI	LAMO	
3	BATUI	HONBOLA	
3	BUNTA	HION	
3	BUNTA	PONGIAN	
3	BUNTA	LONTIIO	
3	SIMPANG RAYA	SIMPANG DUA	
3	SIMPANG RAYA	DOWIWI	
3	SIMPANG RAYA	KONINIS	
3	KINTOM	BABANG BUYANGGE	
3	KINTOM	TANGKIANG	
3	KINTOM	MENDONO	

3	PAGIMANA	BALOA DODA	
3	PAGIMANA	PAKOWA	
3	PAGIMANA	NAIN	
3	PAGIMANA	JAYA BAKTI	
3	PAGIMANA	DONGKALAN	
3	Bualemo	LONGKOGA BARAT	
3	Bualemo	MALIK	

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Bunta desa Matabas, Kecamatan Pagimana desa Sepak, Kecamatan Bualemo desa Binsil K dan desa Taima. Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Toili (2 desa), Kecamatan Toili Barat (1 desa), Kecamatan Moilong (3 desa), Kecamatan Batui (4 desa), Kecamatan Bunta (3 desa), Kecamatan Simpang Raya (3 desa), Kecamatan Kintom (3 desa), Kecamatan Pagimana (5 desa), Kecamatan Bualemo (2 desa) sehingga total jumlah desa rentan sebanyak 30 Desa tersebar di 9 Kecamatan.

Perbandingan hasil analisis pemetaan (Prioritas 1 – 3) tahun 2023 dan 2024 sudah menurun, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Perbandingan Hasil Analisis Kerentanan Pangan tahun 2023 dan 2024 (P 1 – 3)

Status	T a h u n	
	2023	2024
Prioritas 1	0 Desa	0 Desa
Prioritas 2	7 Desa	4 Desa
Prioritas 3	19 Desa	26 Desa
Jumlah	26 Desa	30 Desa

Hasil analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) pada tahun 2023 jumlah desa yang masuk kategori rentan pangan 26 desa, dan 2023 berjumlah 30 desa. Perubahan jumlah desa tersebut karena adanya perubahan status sebagian besar desa dari status rentan menjadi tahan pangan, beberapa desa bergeser dari prioritas 2 menjadi prioritas 3, dan ada desa yang masih tetap berada pada status yang sama, hal ini merupakan tantangan dan membutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam menangani daerah rentan rawan pangan dengan berbagai intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai secara berkolaborasi antar OPD sehingga wilayah dengan status rentan akan menjadi tahan pangan, dan yang telah tahan pangan tetap terjaga agar lebih tahan pangan.

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2-3 (30 Desa) secara umum di sebabkan oleh : (1) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, (2) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa dan (3) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 secara umum disebabkan oleh : (1) rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga, (2) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk dan (3) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desa prioritas 2-3 yang tersebar di Kecamatan, Bunta, Pagimana, Bualemo, Toili, Toili Barat, Moilong, Batui, Simpang Raya, Kintom.
- b. Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten.
- c. Desa-desa di pegunungan dan terpencil yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 14. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten Banggai diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya pangan lokal.
- b. Pemanfaatan lahan pertanian (lahan pekarangan dan lahan terbuka/lahan tidur) secara optimal.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Peningkatan akses infrastruktur jalan sebagai media penghubung antara desa dan kota atau sebaliknya
- f. Penyediaan tenaga kesehatan.

LAMPIRAN

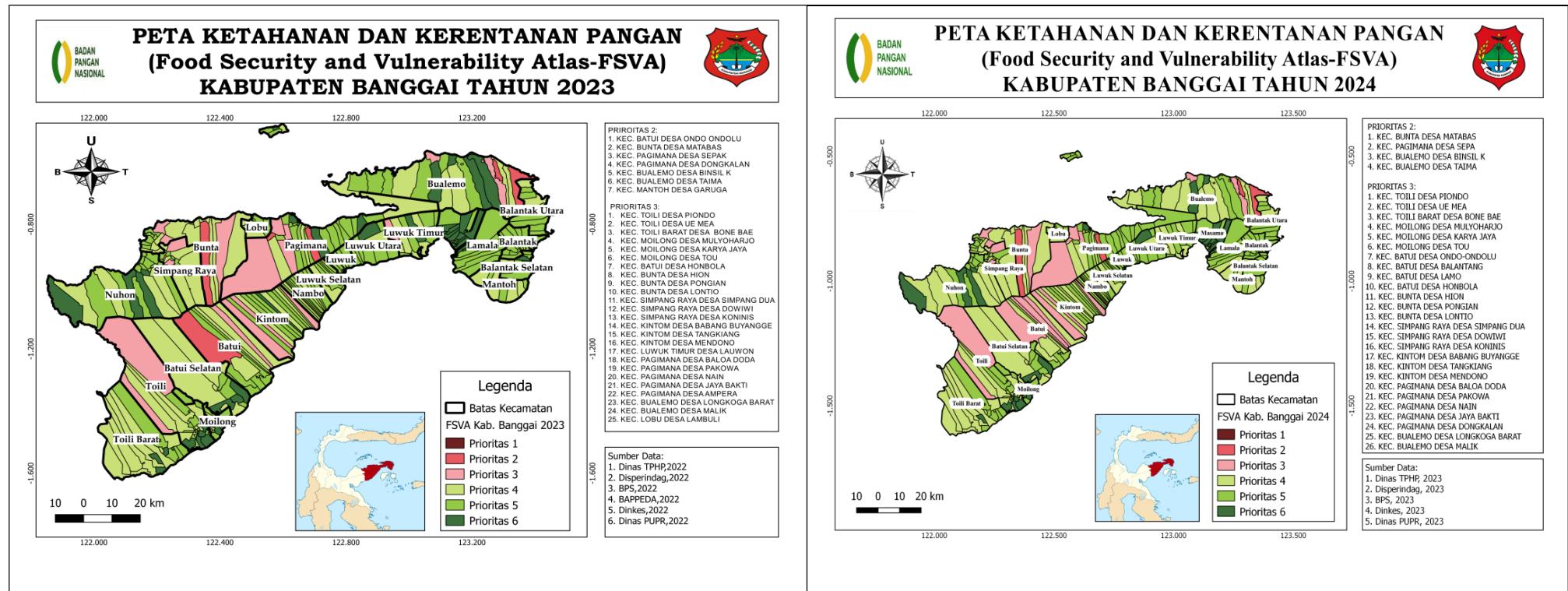
INDIKATOR FSVA KABUPATEN BANGGAI

ASPEK	INDIKATOR	SUMBER DATA
Ketersediaan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah Desa 2. Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga 	BPS; Pusat Data Informasi Kementerian 2023, Dinas TPHP 2023 ; Potensi Desa 2023, BPS Jumlah Rumah Tangga 2023
Akses Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Jumlah Penduduk 4. Desa yang tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai 	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2021 Jumlah Rumah Tangga dari proyeksi SP 2010, BPS 2023 Potensi Desa 2023, BPS Jumlah Penduduk 2023 proyeksi SP 2010, Dinas PUPR 2023
Pemanfaatan Pangan	5. Rasio Jumlah Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih terhadap Jumlah Rumah Tangga	Dinas PUPR Kab. Banggai Tahun 2023, BPS Jumlah Rumah Tangga 2023

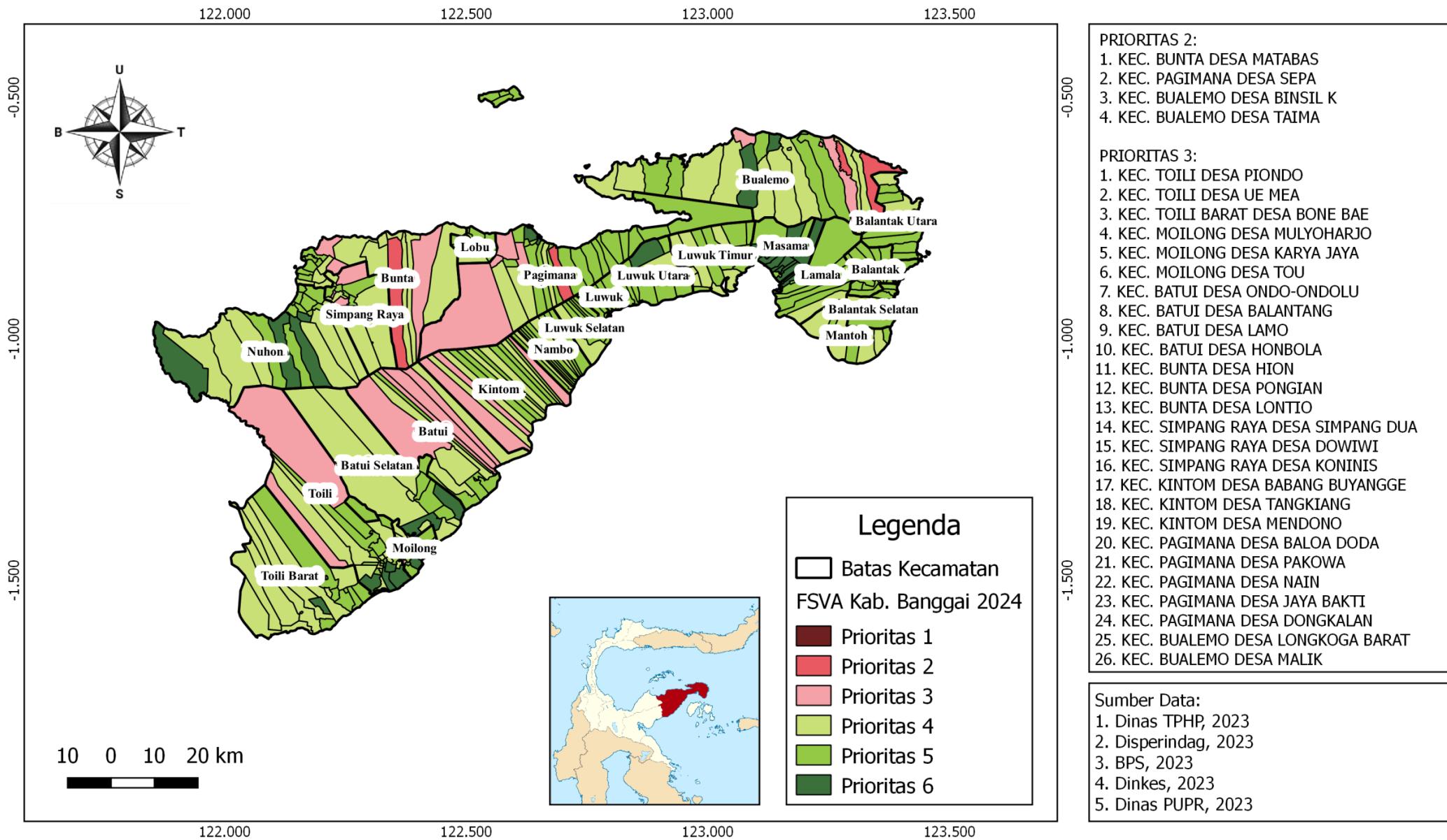
6. Rasio Jumlah Penduduk Desa per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk

Dinas Kesehatan Kab. Banggai
Tahun 2023, BPS Jumlah
Rumah Tangga 2023

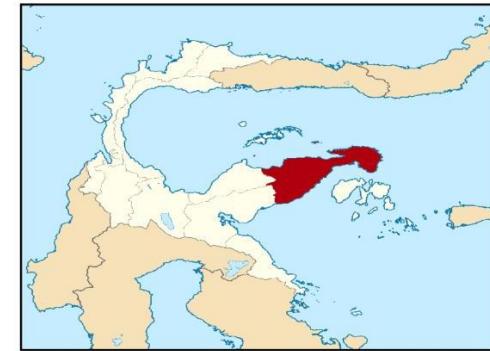
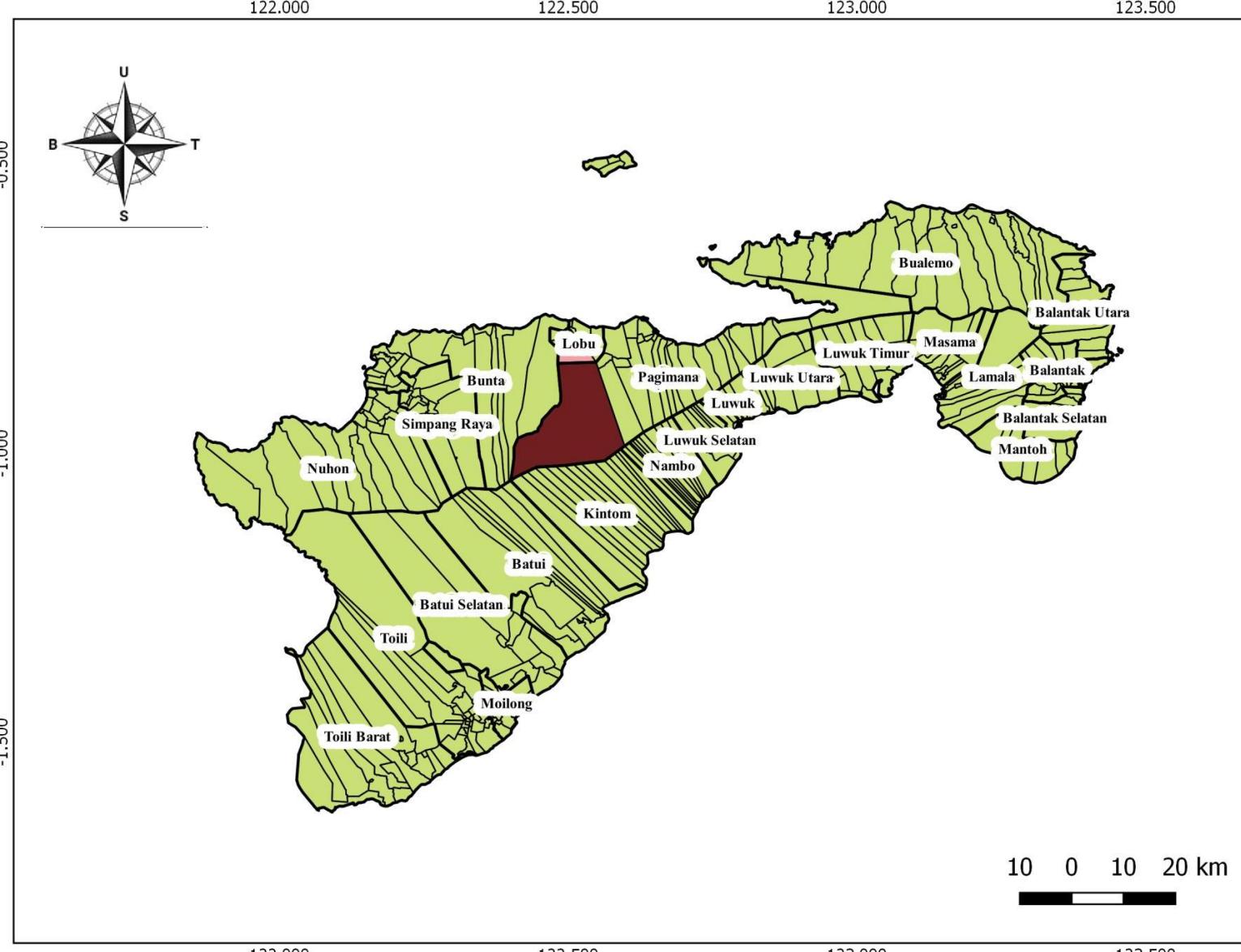
PERBANDINGAN HASIL PEMETAAN FSVA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

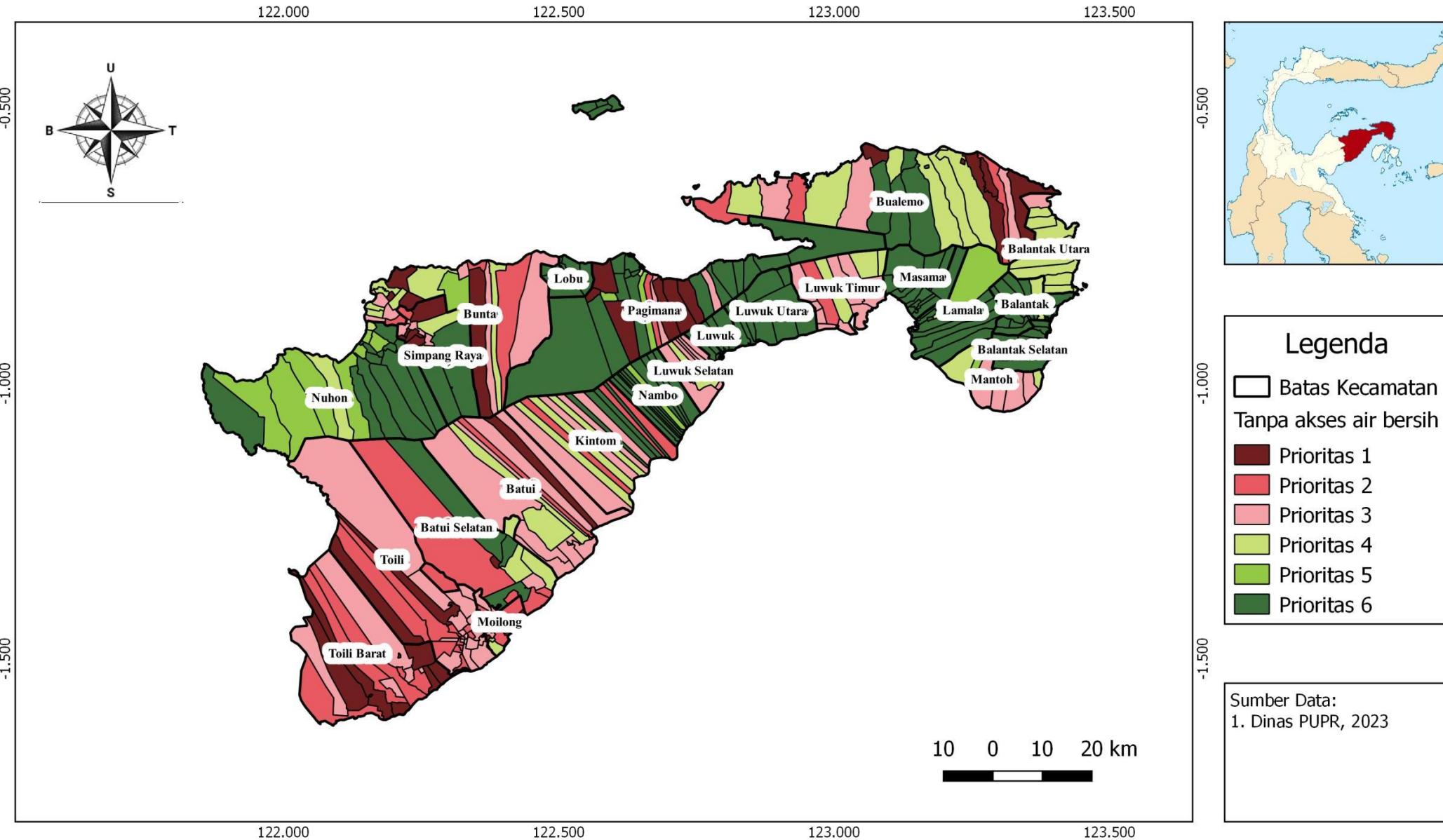


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

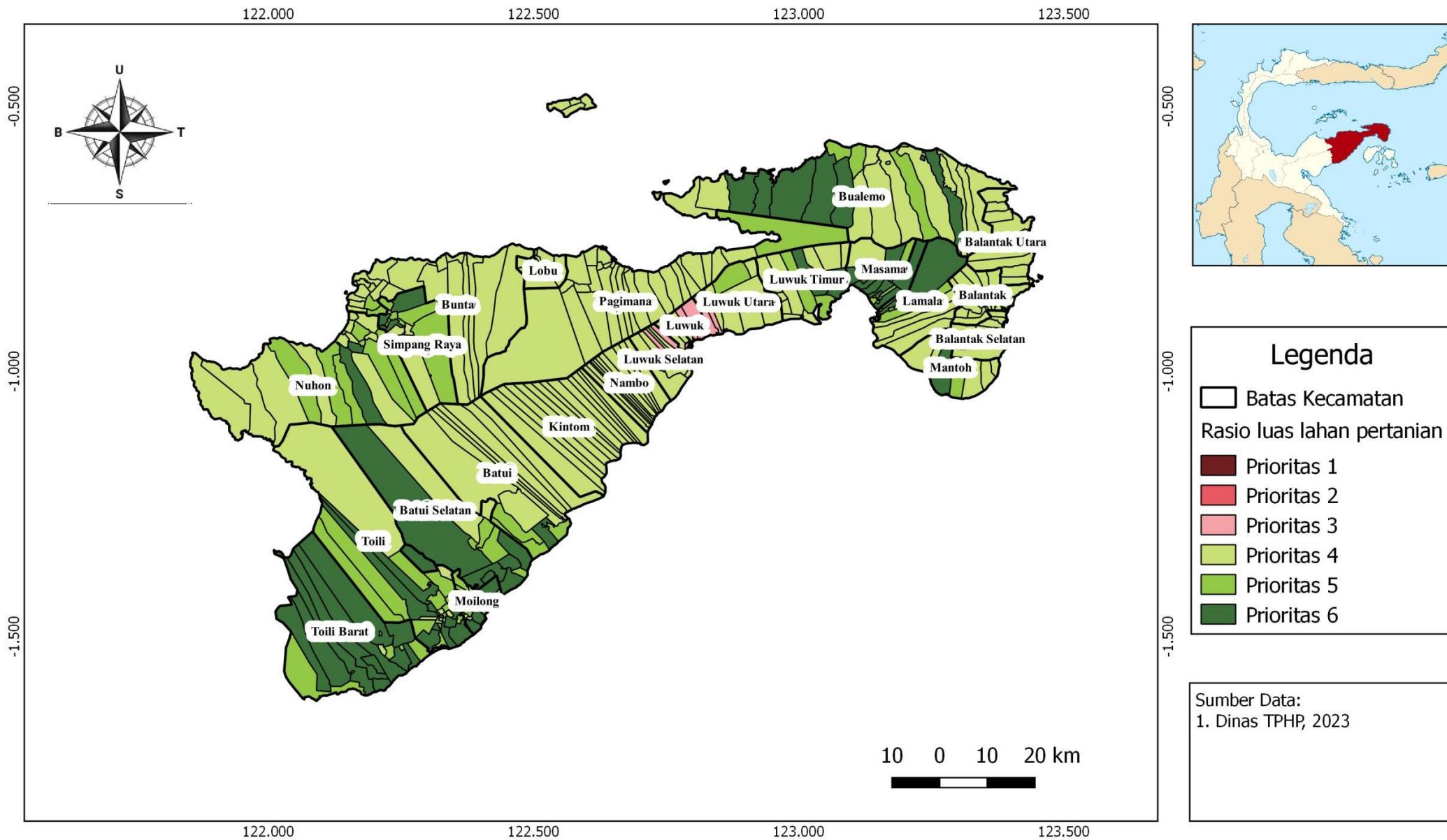


Sumber Data:
1. Dinas PUPR, 2023

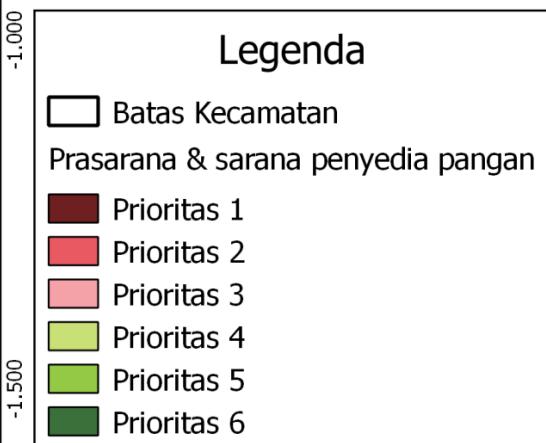
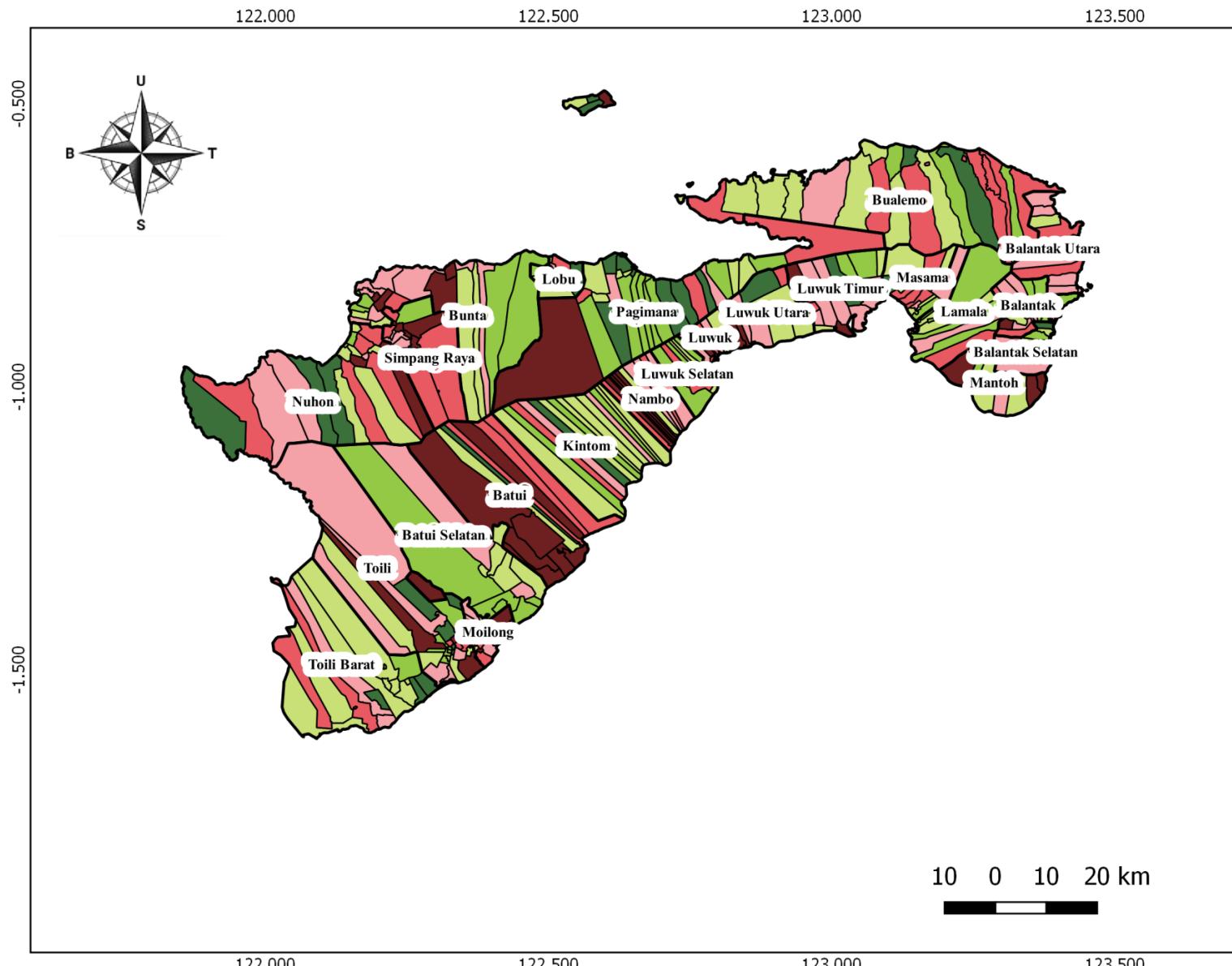
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

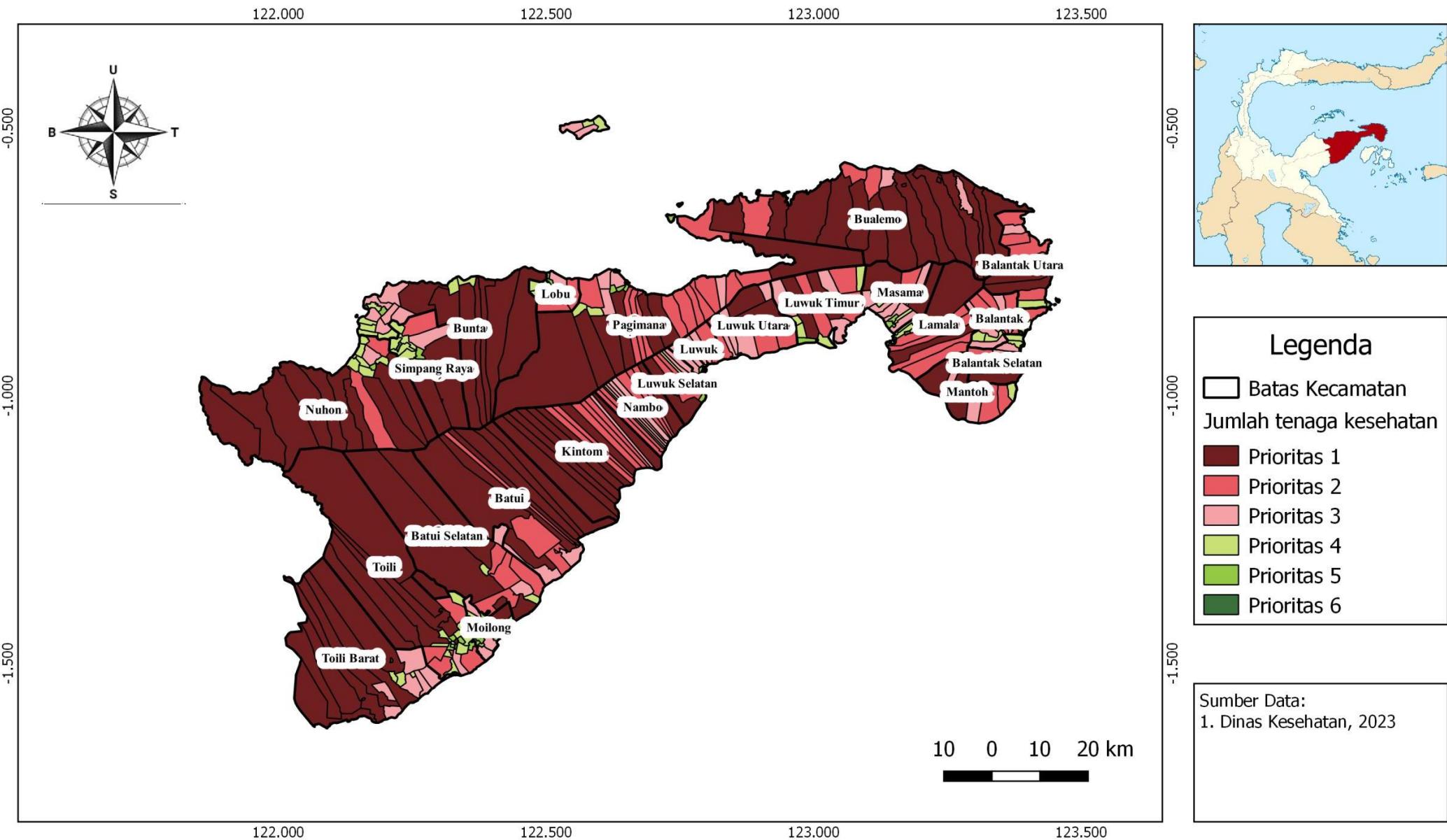


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

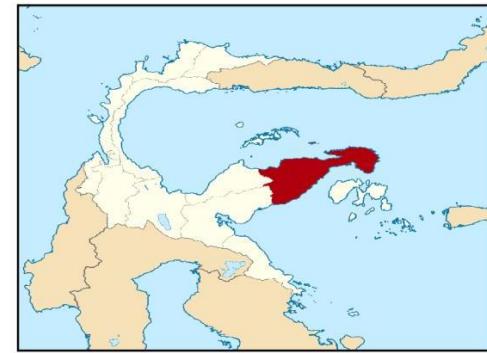
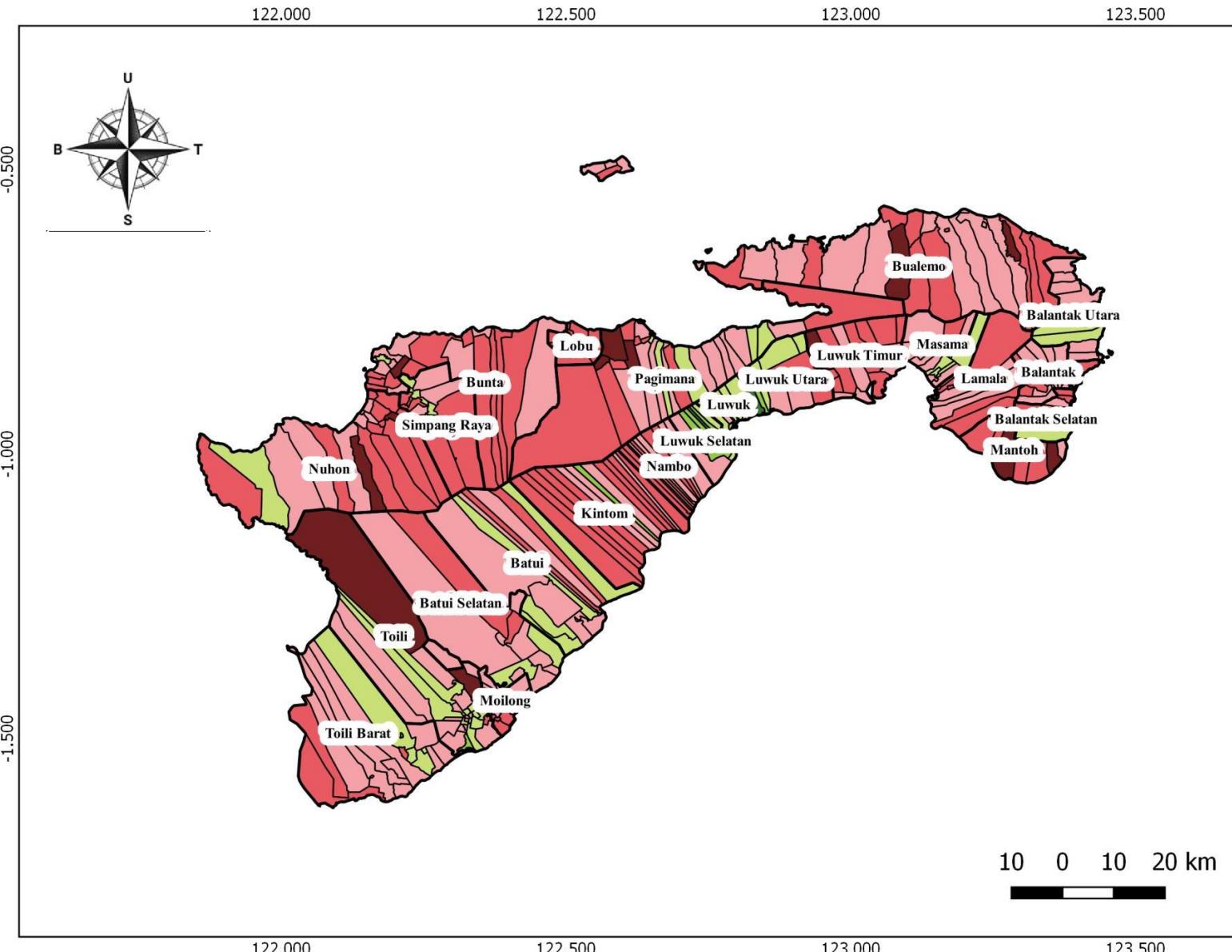


Sumber Data:
1. Disperindag, 2023

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024



Sumber Data:
1. BPS, 2023